

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan urian diatas dan pernyataan penelitian yang ada pada Bab-Bab sebelumnya maka untuk gambaran yang menyeluruh dapat ditarik bebarapa kesimpulan sesuai dengan indikator pertanyaan yang ada, berikut kesimpulan yaitu

##### **1. Akuntabilitas Program**

Seacara umum dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka, perencanaan program pembangunan Desa dan khususnya Desa Tanjung melaksanakan program Desa dengan baik, hal ini dikarenakan akses Desa yang berada di kota sehingga mudah dalam belanja barang dan jasa, berbeda dengan Desa Teniga yang terleletak dipegunungan dengan jarak tempuh yang jauh dari pusat kota, sehingga saat belanja barang dan jasa ada anggaran tambahan yang keluar seperti upah tranfortasi, sehingga ada perbedaan pembangunan dari Desa Tanjung dan Desa Teniga, sementara Desa Malaka pada proses perencanaan program tidak melibat seluruh lapisan masyarakat, dari sekian banyak perencanaan kegiatan masih terdapat beberapa program yang belum bisa terealisasi.

## 2. Akuntabilitas Kebijakan

Dalam pemilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat Desa telah berjalan sekala dengan skla prioritas penggunaan Desa, namun pada saat pelaksanaan anggaran lebih banyak pada pembangunan fisik, misalnya Desa Tanjung , dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar 1.064.260.000 kemudian digunkana untuk pembangunan Desa sejumlah 533.741.300, sementara Desa Teniga , dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk Desa sebesar 2.241.538.000, dari besaran anggaran ini kemudian di gunakan untuk pembangunan Desa sejumlah 1.158.509.631 Dan Desa Malaka , dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Daerah untuk Desa sejumlah 2.653.173.000 dari besaran anggaran ini kemudian digunakan untuk pembangunan Desa dengan jumlah anggaran 810.801.400 Di anggaran tahun 2017.

## 3. Akuntabilitas Proses

Seacara umum proses pertanggungjawban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dan Desa Teniga secara administarasi cukup baik, hal ini bisa dilihat ketepatan waktu saat pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa, namun berbeda dengan Desa Malaka yang telat dalam melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dari BPMD Kabupaten Lombok Utara, penyebab dari keterlambatan adalah kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Malaka yakni pengiputan Data

ke aplikasi system keuangan Desa sehingga saat pembuatan Surat pertanggungjawabab (SPJ) terjadi kesalahan sehingga berdampak pada pertanggungjawaban keuangan Desa anggaran tahun 2017.

#### 4. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Dari sisi kejujuran dan kepatuhan terhadap ragulasi, Desa Tanjung telah mempertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, pada pelaksanaan program bisa dikatakan baik karna melihat tingkat transparansi Desa yang cukup baik walupun masih ada saran-saran dari warga agar pemaparan anggaran Desa di infokan di setiap Dusun di Desa Tanjung. Sedangkan Desa Tanjung secara pertanggungjawaban keuangan Desa pada anggaran tahun 2017 bisa dikatakan baik secara aturan dan administarasi, namun berbeda dengan Desa Malaka yang mengalami keterlambatan petranggunjawabng keuagan Desa pada tahun 2017, hal ini disebabkan kesalahan operator Desa dalam menginput, sehingga proses pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) salah yang mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban keuangan Desa.

#### 5. Kepemimpinan yang berkemampuan

Secara umum kepemimpinan dari ke tiga Desa ini yaitu Desa Tanjung, Desa Teniga, dan Desa Malaka pada tahun 2017 memiki kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai kepala Desa, hal ini dapat dilihat dari tingkat perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Daerah, tapi pada pelaksanaan masih memiliki kekurangan dan kelaamanan dalam pengelolaan Dana Desa khususnya pada Desa Teniga dan

Desa Malaka. Pada Desa Tanjung sejauh ini mendapatkan apresiasi yang bagus dari masyarakat walaupun tidak semua puas pada kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan Desa Teniga memiliki banyak keterbatasan SDM sehingga pada pelaksanaan khususnya pembangunan Desa, diserahkan ke pihak ketiga yaitu kontraktor untuk mengelola semua pembangunan fisik sehingga masyarakat merasa tidak terlibat yang mengakibatkan permasalahan karena masyarakat Desa Teniga cukup partisipatif dalam pembangunan Desa, berbeda dengan Desa Malaka yang dimana pengelolaan dana pembangunan fisik dilakukan oleh pihak ketiga namun masyarakat tidak protes karena partisipasi masyarakat Desa Malaka yang kurang pada pembangunan Desa.

6. Dapat diterima oleh semua pihak

Secara umum masyarakat Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka menerima bentuk kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Desa, karena pada pilihan kebijakan yang diambil berdasarkan kondisi yang memang menjadi keharusan pemerintah Desa untuk membuat kebijakan dengan menggunakan dana Desa pada anggaran tahun 2017. Pada Desa Tanjung sejauh ini melibatkan semua elemen masyarakat pada tahap perencanaan sehingga kepentingan masyarakat bisa secara umum terpenuhi dalam RKP Desa dengan merujuk pada RPJMDesa, sedangkan Desa Teniga pada tahap perencanaan program tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat padahal masyarakat disana cukup partisipatif dilihat dari keterlibatan masyarakat saat gotong royong pembangunan Desa, namun secara kebijakan pembangunan Desa masyarakat sebagian besar menerima kebijakan tersebut. Sementara Desa Malaka pada pemilihan kebijakan sejauh ini diterima

oleh masyarakat, karna masyarakat Desa Malaka sendiri yang kurang partisipatif pada tahap perencanaan pembangunan Desa.

7. Perlu pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Desa khususnya Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka yang menggunakan dana Desa ini masih tergolong baik, meskipun di Desa Teniga dan Desa Malaka masih belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses awal perencanaan program, namun pada pelaksanaan kegiatan masyarakat dapat memahami dampak positif dari pilihan kebijakan dalam bidang pembangunan Desa oleh pemerintah, misalnya pada pembangunan jalan Desa di Desa Malaka tidak ada warga yang protes dan pada saat pembangunan talud di Desa Teniga masyarakat menerima dengan positif pilihan kebijakan dari pemerintah. Hal ini juga terjadi di Desa Tanjung yang menerapkan musrembang Dusun sehingga itu menjadi formulasi program Desa yang tertuang dalam RKPDesa dan masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung.

8. Adaptasi secara terus menerus

Secara umum pemerinta Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka terus berupaya dalam melakukan adaptasi atas perbuahan pada masyarakat dan peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan dan Desa, namun pada kenyataan pelaksanaan dana Desa di tahun 2017 masih belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan karna masyarakat belum merasakan pemberian dana Desa secara maksimal, karena fokus pemerintah Desa secara umum hanya pada pembangunan fisik, sedangkan pembangunan kualitas SDM masih kurang, ini dilihat dari

minimnya program pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

## **1.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam kesimpulan. Maka perlu juga dikemukakan saran-saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa seharusnya mempertimbangkan secara matang dalam melakukan perencanaan program yang akan dikerjakan, dalam hal ini juga pemerintah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa dalam melakukan perencanaan program, sehingga keputusan yang diambil dalam menyusun program melewati musyawarah dan mufakat bersama antara masyarakat dengan pemerintah Desa, sehingga akan mendukung pencapaian tujuan dari perencanaan pembangunan di Desa. Disisi lain dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan, misalnya Desa Teniga yang terletak di pegunungan dan jauh dari perkotaan dan masih dalam keterbasan dalam infrastruktur sehingga sangat perlu pemerintah Desa dan Pemerintah daerah bersinergi dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan pemerintah Desa Malaka harus melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pembangunan Desa dan masyarakat harus ikut berpartisipasi pada pembangunan Desa, dan Desa Tanjung harus lebih melakukan keterbukaan terhadap transparansi anggaran kegiatan kesetiap Dusun-dusun yang ada di Desa Tanjung.
2. Dalam penggunaan Dana Desa tidak seharusnya difokuskan pemerintah memfokuskan pada pembanguana Desa di sector fisik saja, malainkan dari

sisi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat juga seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka, oleh sebab itu pemerintah Desa seharusnya memprioritaskan juga program pelatihan keterampilan pada kelompok masyarakat untuk mengelola sumberdaya kekayaan yang ada di Desa, seperti pengembangan kelompok tani, nelayan, pengrajin, peningkatan wira usaha baru sehingga menambah peningkatan pendapatan Desa.

3. Untuk mencapai target yang di inginkan, maka kepala Desa lebih meningkatkan konsistensi terhadap apa yang telah direncanakan, hal ini juga harus dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka yang secara proses pertanggungjawaban haruslah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, seperti saat proses pengurusan pertanggungjawaban, pemerintah Desa harus berkerja bertahap saat pembuatan surat pertanggungjawaban sehingga bisa terintegrasi dengan baik, karna biasanya pemerintah Desa melakukan pembuatan SPJ pada akhir tahun yang membuat mereka kelabakan saat menyusun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.
4. Pemerintah Desa seharusnya menyampekan secara terbuka terhadap masyarakat terkait dengan pembangunan Desa dari segi fisik dan pemberdayaan masyarakat yakni non fisik, tujuannya untuk peningkatan transparansi dana Desa ke public, sehingga tidak munculnya kecurigan dari masyarakat terhadap pemerintah Desa tentang penyalahgunaan keuangan Desa.

5. Dalam meningkatkan kapasitas dari SDM pemerintah Desa, sangat perlu pemerintah daerah membuat sarana atau membuat program pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan dana Desa, artinya perlu sinergitas antara pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah agar SDM perangkat Desa bisa mengelola anggaran Desa dengan maksimal. Sehingga penggunaan dana Desa lebih terarah dan tepat sasaran.
6. Untuk mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat, pemerintah Desa harus melakukan keterbukaan anggaran dan setiap pembahasan terkait dengan perencanaan program tidak semestinya dilakukan di lingkungan internal pemerintah, namun harus dibuka secara umum agar masyarakat menerima terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Walaupun pada kenyataan pilihan program yang dilakukan pemerintah Desa sejauh ini tetap diterima oleh masyarakat namun sudah menjadi keharusan pemerintah Desa untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait dengan dampak negatif maupun positif dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa serta pemerintah Desa harus membuka ruang untuk masyarakat dalam menanggapi program yang akan dilakukan atau yang sudah di laksanakan.
8. Agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat. Maka pemerintah Desa harus melakukan keadilan program, agar semua elemen masyarakat tersentuh oleh program pemerintah Desa dan masyarakat secara keseluruhan menikmati hasil dari pelaksanaan yang dilakukan oleh

pemerintah Desa, oleh sebab itu pemerintah harus lebih jeli melihat perubahan sikap masyarakat dari segi pola perilaku, maupun perubahan tingkat kesejahteraan rakyat.